

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ekowati. (2014). *Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI*. Salatiga : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga.
- Fajarini dkk. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis*. Jakarta: PSKP Kemdikbud.
- Haboddin. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang : UB Press.
- Hartono et al. (2018). *Metoda Pengumpulan Teknis dan Analisa Data*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Hendriyanto. (2018). *Buletin Perpustakaan Bung Karno, Tahun X/Vol. 1/2018* . Jawa Timur: Perpustakaan Proklamator Bung Karno .
- Ilham. (2004). *Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Tinggi, Studi Perbandingan di Universitas Brawijaya*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Kadir. (2017). *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. Dharmasraya : CV. Dharma Persada.
- Lutfi dan Fathani. (2013). *Hitam Putih Pendidikan Menyingkap Realitas Merajut Solusi*. Malang : UB Press.
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* . Amerika Serikat: Universitas Michigan.
- Oesman. (2022). *Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas*. -: Adoc.pub.
- Perdana. (2015). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Penelitian PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas, Kemdikbud.
- PNF. (2017). *Karakteristik Program Utama dan Pendukung SPNF/PKBM*. Jakarta: Kemdikbud.

- Rosdianti dkk. (2008). *Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemnuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Santi dan Suryono. (2019). *Pendidikan Kesetaraan*. Jawa Tengah: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Serevina. (2020). *Fundamental of Education (Pentingnya Memahami Landasan Ilmu Pendidikan)*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV. Jejak.
- Subagyo. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana dan Ibrahim. (2009). *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung :Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Tambunan. (2019). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wijaya. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Jakarta: Prenada Media.

Artikel Jurnal dan Skripsi

- Abdurakhman. (2019). *Masalah Sosial dan Social Demand dalam Aksesibilitas Pendidikan*. *Tadbir Muwahhid*, 3(2), 183-193.
- Adella dan Roesminingsih. (2020). *Hubungan Antara Kompetensi Tutor dengan Keefektifan Pembelajaran Kesetaran Paket B Kelas 7 Di SPNF SKB Negeri Malang*. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*. 04, 135- 146.

- Anwar. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *FOUNDASIA*. 13(1) 2022 (1-15).
- Damayanti. (2018). Rendahnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan Di Indonesia. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga .
- Fajarini dkk. (2020). Evaluasi Pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal. Jakarta : *Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Hula. (2020). Aksesibilitas Pendidikan Gratis Pada Sekolah Swasta di Gorontalo Utara. 16 (2), 2020, 1-27.
- Khoiriah. (2019). Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Pati. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Libriyanti. (2019). Pemenuhan Hak Peserta Didik Melalui Aksesibilitas Pendidikan Agama. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*. 4(1) 2019.
- Muazzinah. (2022). Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin Pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School di Aceh. *International Journal of Government and Social Science*.7(2) 2022.
- Rosmini dkk. (2020). Analisis Kebijakan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan yang Bermutu . *Jurnal MAPPESONA*. 3(2) 2020.
- Salam dan Aneta. (2020). Kompetensi Pamong Belajar Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C . *Journal of Public Administration Studies*. 2(2) 2019.
- Sapinah. (2021). Peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Serang Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal . *Parameter*. 33(2) 2021.
- Tarsidi. (2019). Kesempatan dan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pendidikan. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wijana. (2018). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah di Provinsi. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*. 1(1) 2018.
- Yuliana. (2019). Analisis Kepemimpinan di SPNF-SKB Kabupaten Langkat. Medan: Universitas Medan Area .

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Direktoral Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidik/Tutor Bantu Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pada Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018.

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Belajar Kota Tanjungpinang Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tanjungpinang.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penerapan Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan.

Surat Keputusan Kepala SPNF SKB Kota Tanjungpinang Nomor 137/053/5.31.01/2020 tentang Kriteria Lulusan Peserta Didik di SPNF SKB Kota Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2019/2020.

Sumber Lainnya

KBBI. (2022, September 2). 2 Arti Akses di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.lektur.id/akses#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,untuk%20penulisan%20atau%20pembacaan%20data>.

Kemdikbud. (2022, Maret 24). (P9969990) SKB Kota Tanjungpinang: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/749e3a23-1204-4534-ba91-db573832c457>

Kemdikbud. (2022, September 2). Berbagi Kewenangan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>.

- Kemdikbud. (2022, September 2). Menilik Pendidikan Kesetaraan: <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/menilik-pendidikan-kesetaraan>.
- Kepri, Dinas. Pendidikan. (2022, November 11). *Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022*: https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi_publik/12/LAKIP_2022.pdf
- PKBM. (2022, Agustus 23). *PKBM Bina Insan Kamil. Paket B Setara SMP/MTS*: <https://pkbmbinainsankamil.sch.id/paket-b-setara-smp-mts/>
- Tanjungpinang. (2022, Februari 23). *Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023*: https://www.tanjungpinangkota.go.id/data-download/190919-renstra_2018_2023-7217000000-disdik.pdf
- Tanjungpinang, D. P. (2022, September 1). *Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LAKIP-2021)*: <https://disdik.tanjungpinangkota.go.id/publik/produk/tabel/sakip-tahun-2021>.

